



Siagakan Posko Pengawasan

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta menyiagakan 25 posko pengawasan untuk mengantisipasi potensi pembuangan sampah liar di wilayahnya. Apalagi, tumpukan sampah liar disinyalir tak melulu berasal dari aktivitas warga Kota Yogya, melainkan juga dari luar daerah.

Kepala Satpol PP Kota Yogya, Octo Noor Arafat, berujar, sebanyak 25 posko pengawasan telah disiagakan untuk mengantisipasi potensi pembuangan sampah liar. Deretan posko tersebut, diperkuat oleh 125 personel Satpol PP dan Linmas yang bertugas 24 jam penuh, dengan dibagi ke dalam tiga sif.

Dijelaskan, pada awalnya, posko hanya disiagakannya di 15 titik yang dianggap paling rawan kasus pembuangan sampah liar. Akan tetapi, berjalannya waktu, jumlah posko terus bertambah, seiring pergeseran lokasi pembuangan liar di titik

● Ke halaman 11

Siagakan Posko

● Sambungan Hal 1

yang tidak diawasi petugas.

"Posko berkembang, dari awal jumlahnya 15, kemudian jadi 22 dan sekarang 25. Jadi, perkembangan jumlah posko ini untuk mengantisipasi titik pembuangan sampah baru," tandasnya, Jumat (18/4)

Misalnya, ketika Satpol PP membuka posko di Jembatan Juminahan, selang beberapa hari, lokasi pembuangan liar bergeser ke Jalan Bausasran dan Jalan Mataram. Maka, sebagai upaya antisipasi, pihaknya pun memutuskan memperluas posko untuk menekan ulah warga nakal di dua lokasi tersebut.

"Sejauh ini, yang tertangkap tangan ada 5, yang ketemu tapi melarikan diri dengan kendaraannya 12 dan yang terindikasi akan membuang tapi dapat dihalau ada 45," ujarnya.

Perbatasan

Wali Kota Yogyakarta, Hast Wardoyo, mengatakan, ke-

beradaan posko yang dikawal Satpol PP dan Linmas itu terbukti mampu menjadi solusi. "Posko akan kita pertahankan selama 100 hari kerja ini, untuk membiasakan, karena mengatur manusia itu tidak mudah," ujarnya.

Mantan Bupati Kulon Progo itu, mengungkapkan, selaras pencermatannya, pelaku pembuangan sampah liar bukan sebatas warga Kota Yogyakarta saja. Di kawasan-kawasan perbatasan, lanjutnya, banyak penduduk luar daerah yang melintas sambil menaruh sembarangan limbahnya.

"Satpol PP sudah kita minta untuk melakukan penjagaan, terutama di wilayah perbatasan Bantul, di sekitaran Ringroad itu. Kalau ada orang yang nekat buang, ya kita tangkap. Banyak orang luar kok itu yang membuang. Mereka lewat terus membuang di situ," cetusnya.

Meski demikian, ia menegaskan, Pemkot Yogyakarta belum terpikir untuk kembali melakukan penindakan seca-

ra yustisi terhadap pelanggar.

Alih-alih menyeretnya ke meja hijau guna melakoni sidang tindak pidana ringan (tipiring), pelanggar sebatas diberikan pembinaan saja. "Penindakan yustisi itu nomor ke sekian, sepanjang kita masih bisa musyawarah mufakat, kita tidak kehabisan akal kok," terangnya.

Tutup TPS

Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta menutup total puluhan tempat penampungan sementara (TPS) dan tidak dioperasikan kembali. Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menyebut, di wilayahnya terdapat 31 TPS yang kondisinya sudah kosong. Bahkan, proses pembongkaran pun sudah ditempuh dan telah terlaksana di 17 TPS yang mayoritas berdiri di sekitar permukiman warga.

Beberapa TPS yang sudah dibongkar antara lain, TPS Sagan (kapasitas 3 ton), TPS Pasar Sore (2 ton) dan TPS Depok Kotagede (2 ton). "Semua (TPS) statusnya sudah ditutup. Tanggal 11 April, kami melaku-

kan pengosongan sampah di semua TPS," katanya.

Meski demikian, Agus menyebut, masih ada TPS yang sebelumnya sudah dikosongkan tapi muncul sampah baru, seperti di TPS Sisingamara. Untuk menanggulangi fenomena tersebut, pihaknya pun menerjunkan kontainer khusus dari depo sampah di Jalan Brigjen Katamso.

Sementara, sampai sejauh ini, Pemkot Yogyakarta telah memiliki 1.330 transporter atau penggerobak yang bertugas mengangkut sampah ke depo. Berdasarkan peta asesmen, 45 kelurahan menyatakan jumlah penggerobak cukup untuk melayani warga dan armadanya tersedia. "Sekarang jumlah kelurahan berstatus hijau ada 25 dan berwarna kuning 20. Status hijau berarti kelurahan dalam pengelolaan sampah tidak ada masalah atau sudah baik. Sedangkan kelurahan berwarna kuning berarti masih ada persoalan, seperti pembuangan sampah di luar depo," lanjut Agus. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005